

## **Problematika Perempuan Dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024**

**Fatimah Azzahra Kaloko<sup>1</sup>, Nazila Riski Hayati<sup>2</sup>, Riri Maria Fatriani<sup>3</sup>**  
*.Program Studi Ilmu Politik & Ilmu Pemerintahan / Universitas Jambi / Jambi*

**Email: [fatimahkaloko07@gmail.com](mailto:fatimahkaloko07@gmail.com)**

### **Abstract**

*This research analyzes issues related to women's representation in the election of members of the Dairi Regency DPRD in the period 2019-2024. The approach method that will be used is qualitative which is presented in descriptive form, namely a method that provides a clear picture of the systematic problems being studied. The techniques used in the data collection process are interview techniques and documentation techniques. The data analysis technique uses the Miles and Huberman interactive model, which is a technique presented in the form of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this research show the conditions and situation regarding women's representation in the process of selecting members of the Dairi Regency DPRD in the 2019-2024 period which still shows a percentage below 30%. This is caused by several problems, namely the existence of a patriarchal culture that is still embedded in society so that matters - Affairs related to politics or political parties are more identified and carried out by men. There are also several factors that show that the level of awareness of women in Dairi Regency is still low, as well as the lack of political influence or political parties, this also makes the situation and conditions of women difficult to get involved directly or indirectly in competing and contributing with men.*

**Keywords: Women's Representation, Dairi Regency DPRD**

### **Abstrak**

Penelitian ini menganalisis persoalan terkait keterwakilan perempuan dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten Dairi pada periode tahun 2019 - 2024. Metode pendekatan yang akan digunakan adalah kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif, yaitu metode yang memberikan suatu gambaran yang jelas tentang sistematis permasalahan - permasalahan yang sedang dikaji. Teknik yang digunakan dalam proses pengumpulan data adalah teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles and Huberman, yaitu suatu teknik yang disajikan dalam bentuk reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini memperlihatkan tentang kondisi dan situasi terkait keterwakilan perempuan dalam proses pemilihan anggota DPRD Kabupaten Dairi pada periode tahun 2019-2024 yang masih menunjukkan presentase dibawah 30% hal ini disebabkan oleh beberapa problematika, yaitu adanya budaya patriarki yang masih melekat di masyarakat sehingga urusan - urusan yang berkaitan dengan politik atau partai politik lebih identik dilakukan dan dikerjakan oleh kaum laki - laki. Kemudian juga terdapat beberapa faktor yang menunjukkan masih rendahnya tingkat angka kesadaran wanita di Kabupaten Dairi, serta adanya pengaruh politik atau partai politik yang masih kurang, hal tersebut juga membuat situasi dan kondisi perempuan sulit untuk terlibat secara langsung

atau tidak langsung dalam berkompetisi dan persaingan serta berkontribusi dengan kaum laki - laki.

### **Kata kunci: Keterwakilan Perempuan, DPRD Kabupaten Dairi**

#### **I. Pendahuluan**

Peran dan posisi kaum perempuan yang cukup kentara (terlihat/nyata) akan mengalami diskriminasi, pada hal masalah ini dalam wilayah publik merupakan bagian dari hak-hak asasi setiap manusia berhak memiliki. Keterwakilan peran dan posisi kaum perempuan di wilayah Indonesia dalam proses pengambilan kebijakan masih sangat terbatas. Kondisi ini disebabkan karena adanya konstruksi sosial budaya yang terbentuk dari masyarakat itu sendiri, sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda, akan tetapi berkaitan dengan representasi perempuan di dunia politik harus tetap menjadi perhatian serius. Pada lembaga legeslatif di DPRD Provinsi Sumatera Utara keterwakilan anggota perempuan tergolong sedikit, bisa dilihat berdasarkan periode 2004-2009 keterwakilan perempuan hanya 5 anggota pada hal jumlah kursi yang tersedia sebanyak 85 kursi, kemudian pada periode 2009-2014 walaupun mengalami peningkatan sebanyak 16 anggota legiskatif perempuan menjadi 100 kursi yang tersedia, tetapi jumlah tersebut belum mencapai kuota 30% menurut Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Pada periode selanjutnya keterwakilan perempuan dalam legislatif di Sumatera Utara mengalami penurunan, dapat dilihat pada periode 2014-2019 hanya ada 14 keterwakilan perempuan sebagai anggota legeslatif dari 100 kursi yang tersedia. Kemudian pada pemilihan anggota legislatif periode 2019-2024 yang lalu tetap mengalami penurunan karena hanya 13 anggota legislatif perempuan dari 100 kursi yang tersedia.

Budaya patriarki adalah sistem yang memposisikan laki-laki sebagai pemilik kekuasaan atau otoritas tertinggi di setiap bidang kehidupandalam artian perempuan tidak memiliki kebebasan dan berada satu tingkat di bawah laki-laki. Peran perempuan di Kabupaten Dairi masih rendah karena adanya bentuk budaya patriarki. Kabupaten Dairi yang di dominasi suku batak dengan memegang kuat adat istiadat dan budaya. Menurut (Penabudaya.com, 2021) budaya Suku Batak terdapat sistem kekerabatan yang menerapkan sistem atau sikap dalam memperlakukan orang lain, seperti Elek Marboru dan Somba Marhulu-hula yang merupakan cerminan patriarki antara laki-laki dan saudara perempuan. Pada setiap acara adat biasanya saudara perempuan begitu dipandang, sedangkan saudara laki-laki menjadi raja dan tokoh utama dalam acara adat. Berdasarkan hal tersebut dengan melekatnya budaya patriarki yang berjalan di Kabupaten Dairi menyebabkan rendahnya partisipasi kaum perempuan dalam dunia politik dan menimbulkan kurangnya kesadaran perempuan untuk berperan dalam dunia politik.

Kurangnya kesadaran perempuan Kabupaten Dairi untuk berpartisipasi dalam dunia politik merupakan bentuk belenggu (ketidakbebasan) dari adanya budaya patriarki yang berjalan. Adanya konstruksi sosial yang terbangun, kesempatan untuk terjun dalam dunia politik menjadi kurang. Perempuan cenderung tidak memiliki kebebasan karena realitas sosial menuntut untuk menjadi ibu rumah tangga semata. Hal ini menjadi masalah utama karena di dalam konstitusi sudah tertulis jelas bahwa setiap

warga negara memiliki hak politik yang sama.

Hal-hal yang dilakukan untuk mendapatkan beberapa peluang serupa dalam politik salah satunya perempuan memerlukan saluran aspirasi seperti, partai politik. Menurut (Hasriani, 2019) keikutsertaan perempuan dalam partai politik merupakan tempat yang tepat, karena di dalam partai politik kaum perempuan mendapatkan pendidikan politik dan etika politik. Akan tetapi, di Kabupaten Dairi sendiri partai politik yang memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam politik terbilang rendah. Hal tersebut dibuktikan dengan hanya 5% perwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Dairi dengan artian partai politik tidak serius dalam memberikan peluang kepada perempuan dalam mengambil peran di kontestasi politik.

## II. Metode Penelitian

Jenis penelitian menggunakan pendekatan metode kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif. Menurut (Sugiyone, 2016) metode kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). Selanjutnya dari sisi penyajian dilakukan dalam bentuk deskriptif, yaitu memberikan suatu gambaran jelas tentang sistematis permasalahan-permasalahan yang dikaji. Data dalam penelitian menggunakan dua sumber, yaitu data primer dan sekunder. Data primer di dapat dari hasil wawancara secara langsung dengan ketua, wakil ketua serta anggota DPRD Kabupaten Dairi, anggota DPRD perempuan Kabupaten Dairi, Ketua Partai Demokrat, Golkar Kabupaten Dairi, aktifis perempuan Kabupaten Dairi dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

*Vol. 7. No. 2 (2024)*

Kabupaten Dairi. Data sekunder di dapat dari naskah akademik rancangan UUD pengarusutamaan gender Kabupaten Dairi, Jurnal dan dokumen lainnya.

## III. Hasil dan Pembahasan

Temuan dari penelitian ini mendeskripsikan berbagai problematika terkait keterwakilan perempuan dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten Dairi tahun 2019-2024. Dapat dilihat ada 3 poin utama yang menjadi problematika keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Dairi. Berdasarkan wawancara dengan narasumber yang telah peneliti tentukan, maka dapat di uraikan sebagai berikut:

### A. Budaya Patriarki

Secara umum budaya patriarki masih melekat dalam kehidupan masyarakat, hal ini menandakan bahwa laki-laki masih pada posisi yang lebih tinggi dari perempuan. Khususnya di daerah Sumatera Utara masyarakat sebagian besar masih menganut Suku Batak, sehingga masyarakat disana masih menganggap posisi perempuan dalam masyarakat dipandang tidak melebihi laki-laki dan laki-laki juga selalu diposisikan paling utama, unggul dan dominan dalam masyarakat. Begitu juga pada keterwakilan perempuan yang duduk di DPRD Kabupaten Dairi, akibatnya masyarakat di Kabupaten Dairi yang masih menganut budaya patriarki sehingga mengacu pada kondisi sosial budaya yang memberikan pandangan bahwa laki-laki adalah superior. Hal tersebut bisa diartikan sebagai sebuah pemahaman akan pandangan yang menyatakan bahwa laki-laki berada pada posisi wanita sehingga bisa mengendalikan wanita, budaya seperti ini tumbuh pada masyarakat zaman dulu dan menciptakan mitos tertentu.

### B. Kurangnya Kesadaran Perempuan

Kurangnya akan kesadaran perempuan untuk berpartisipasi ke dalam dunia politik sudah tidak menjadi hal yang baru lagi bagi kita. Hal tersebut salah satunya disebabkan karena adanya budaya patriarki yang telah melekat di masyarakat Kabupaten Dairi, mengakibatkan kurangnya presentase kesadaran perempuan untuk terjun ke dunia politik, dan masih menganggap dunia politik hanya milik kaum lelaki sedangkan perempuan memiliki kehidupan di rumah saja. Kelemahan perempuan akibat budaya patriarki adalah:

- 1) Kurangnya kesadaran akan hak azasi  
Perempuan yang kurang menyadari bahwa dirinya mempunyai hak-hak azasi manusia yang sama dan setara dengan laki-laki.
- 2) Sulit mengendalikan perasaan  
Perempuan sering kali kesulitan menghilangkan perasaan malu dan perasaan takut salah.
- 3) Sulit mengambil keputusan  
Perempuan kurang mampu berpikir jernih dan logis, sehingga sulit mengambil keputusan.
- 4) Beban kerja domestik  
Perempuan memiliki beban kerja domestik yang merujuk pada tugas-tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan pekerjaan rumah tangga, seperti membersihkan, memasak, merawat anak dan mengurus rumah. Beban kerja domestik sering kali tidak terdistribusi secara adil antara perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga, dan cenderung menjadi tanggung jawab utama perempuan.
- 5) Banyak pertimbangan  
Perempuan selalu mempertimbangkan faktor

keluarga, atau tradisi turun temurun keluarga yang aktif di organisasi.

- 6) Kurangnya kontrol emosi  
Perempuan kurang mampu mengendalikan perasaan emosi, sehingga pikirannya kurang stabil dan mudah terpengaruh.

### C. Kurangnya Pengaruh Partai Politik

Adanya peraturan tentang diharuskannya caleg perempuan sebanyak 30% merupakan salah satu kebijakan yang penting dalam proses perjalanan demokrasi kita. Aturan tersebut tertulis dalam beberapa UU, yakni UU no 31 tahun 2002, UU no. 12 tahun 2003, UU no. 2 tahun 2008, UU no, 10 tahun 2008 dan UU no 7 tahun 2017. Tetapi terkadang partai politik hanya menyiapkan caleg perempuan untuk menjadi caleg guna memenuhi keterwakilan 30% perempuan di pencalonan dalam demokrasi, bukan disiapkan untuk duduk di dalam ruang lingkup pemerintahan. Beberapa peran penting yang bisa dilakukan oleh partai politik di Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut:

- 1) Merekrut kandidat perempuan yang berkualitas  
Partai politik harus memastikan bahwa mereka merekrut kandidat perempuan yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang sama dengan kandidat laki-laki. Partai politik harus menempatkan kandidat perempuan di posisi yang strategis sehingga mereka memiliki peluang yang sama untuk terpilih.
- 2) Menggalang dukungan untuk kandidat perempuan  
Partai politik juga harus menggalang dukungan untuk kandidat perempuan mereka dengan cara mempromosikan

kandidat perempuan mereka di media massa dan memobilisasi dukungan dari masyarakat.

- 3) Memberikan pelatihan dan pendampingan

Partai politik harus memberikan pelatihan dan pendampingan kepada kandidat perempuan untuk memperkuat kemampuan mereka dalam ruang lingkup politik, komunikasi, dan membangun jaringan.

- 4) Meningkatkan kesadaran akan pentingnya keterwakilan perempuan

Partai politik juga memiliki peranan penting untuk meningkatkan angka kesadaran masyarakat akan pentingnya keterwakilan perempuan di dalam pemerintahan, seperti DPRD dan berperan aktif dalam mengadvokasi hak-hak perempuan.

- 5) Memonitor dan mengevaluasi kinerja anggota DPRD

Setelah terpilihnya anggota DPRD, partai politik harus memonitor dan mengevaluasi kinerja anggota DPRD mereka. termasuk kinerja anggota perempuan mereka, untuk memastikan bahwa mereka bekerja dengan baik dan memenuhi janji kampanye mereka.

Pada perwujudan perwakilan perempuan yang terbilang rendah yakni hanya 5,7%. Tentu menjadi pertanyaan mengapa hal tersebut dapat terjadi. Berdasarkan wawancara dan kajian literatur yang dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa problematika keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Dairi, antara lain:

- 1) Faktor Sosial dan Budaya

Faktor sosial dan budaya menganggap perempuan tidak lumrah untuk memimpin. Seperti adat yang melarang perempuan untuk keluar rumah tanpa izin suami atau ayahnya.

- 2) Faktor Gender

Faktor gender di dalam masyarakat masih dipandang bahwa politik adalah urusannya kaum lelaki dan perempuan cukup melakukan pekerjaan rumah tangga.

- 3) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi terjadi ketika perempuan mengalami kesulitan ekonomi, mereka cenderung lebih fokus untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dibandingkan terlibat dalam kegiatan politik. Hal ini membuat perempuan sulit untuk berkompetisi dengan laki-laki yang sudah memiliki modal ekonomi yang lebih stabil.

- 4) Faktor Partai Politik

Faktor partai politik pada struktur politik yang di dominasi laki-laki menjadi faktor yang mempengaruhi keterwakilan perempuan dalam DPRD Kabupaten Dairi. Partai politik juga masih kurang memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk bersaing dalam bursa pencalonan sehingga perempuan kurang terwakili dalam daftar calon anggota legislatif.

- 5) Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan masih terdapat banyak perempuan yang kurang mendapatkan kesempatan pendidikan yang memadai juga menjadi alasan sedikitnya perempuan yang terlibat dalam politik.

Keterwakilan perempuan di dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten Dairi memiliki problematika-problematikan yang terdapat di dalam prosesnya. Adapun beberapa upaya yang dilakukan dalam proses meningkatkan angka kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterwakilan dan keterlibatan perempuan di dalam ruang lingkup legislatif, antara lain:

- 1) Memperkuat akses perempuan  
Memperkuat akses perempuan terhadap pendidikan dan pelatihan politik.
- 2) Meningkatkan dukungan  
Meningkatkan dukungan adalah peran yang penting, seperti memberikan dukungan finansial dan jaringan politik.
- 3) Menggalang kesadaran & komitmen  
Menggalang kesadaran dan komitmen politik yang lebih kuat terhadap kesetaraan gender di bidang politik.
- 4) Penerapan kuota gender  
Penetapan kuota gender adalah suatu kebijakan yang ditetapkan sebagai cara untuk meminimalisir kecenderungan yang lebih mendominasi keterlibatan kaum laki-laki.
- 5) Pengendalian rekrutmen  
Pengendalian rekrutmen adalah salah satu langkah yang diambil oleh partai politik dalam proses seleksi, pencalonan, dan penetapan kandidat.

#### IV. Kesimpulan

Kaum perempuan kurang percaya diri untuk berpartisipasi dalam bidang politik disebabkan karena adanya budaya patriarki yang masih melekat dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut terjadi di dalam budaya patriarki karena lebih mengutamakan kaum laki-laki jika

dibandingkan dengan kaum perempuan. Kaum perempuan merasa didiskriminasi dan kurang dipercayai untuk maju ke panggung politik, hal inilah yang menyebabkan kurang kesadaran perempuan untuk berpartisipasi di bidang politik dan juga kurangnya dukungan penuh dari partai politik, perempuan hanya menjadi caleg demi memenuhi kuota pencalonan sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu, perempuan memiliki persaan yang halus, sifat yang lembut jadi harus menopang kaum perempuan dan memberikan kesempatan yang sama untuk menduduki posisi strategis di bidang politik, agar kaum perempuan mampu untuk mengimplementasikan karakter dasarnya yang halus itu melalui kepemimpinannya dalam rangka kesejahteraan masyarakat secara umum.

#### Referensi

- Elsi, S. D., Fatriani, R. M., & Saadah, M. (2022). PENGARUH KONSTRUKSI SOSIAL BUDAYA TERHADAP KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN DI PROVINSI JAMBI. *Journal Publicuho*, 5(3), 776-789.
- Fadli, Y. (2017). Islam, Perempuan dan Politik: Argumentasi Keterlibatan Perempuan dalam Politik di Indonesia Pasca Reformasi. *Journal of Government and Civil Society*, 1(1), 41-63.
- Hendrarto, H. (2019). PERAN PEREMPUAN DALAM POLITIK DI ERA DEMOKRASI: SEPERCIK WACANA PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT DI KABUPATEN MAGELANG. *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, 3(1), 56-69.

- Iriansyah, H. S. (2017). Tantangan dan Peluang Perempuan dalam Berpolitik di Indonesia: Masyarakat Patriarki. *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara*, 8(2), 1-14.
- Madur, M. T. N. (2022). *POLITIK DAN PEREMPUAN (TENTANG TINGKAT KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA PEMILU LEGISLATIF KABUPATEN NGADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE 2019-2024)* (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan dalam negeri).
- Mukarom, Z. (2008). Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif. *MediaTor (Jurnal Komunikasi)*, 9(2), 257-270.
- Niron, E. S., & Seda, A. B. (2020). Representasi politik perempuan pada lembaga legislatif (Studi tentang pencalonan perempuan pada pemilihan umum legislatif tahun 2019). *ARISTO*, 9(2), 203-228.
- Nurdin, N. (2021). KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN DI PARLEMEN PERIODE 2019-2024: PERAN PARTAI
- Vol. 7. No. 2 (2024)  
 POLITIK. *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies*, 2(2), 129-145.
- Priandi, R., & Roisah, K. (2019). Upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 106-116.
- Renhoat, M. L. (2020). *Peran Perempuan Dalam Partai Politik (Suatu Kajian Komunikasi Politik)* (Doctoral dissertation, IAIN Ambon).
- Talaohu, A. R. (2021). Partisipasi Politik Kaum Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Di Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan. *BESTERKUNDE*, 1(1), 15-28.
- Wahid, U. (2013). Perempuan dan kekuasaan politik dalam pemilu pada DKI Jakarta tahun 2012. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 29(1), 73-97.
- Wahyudi, V. (2018). Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 1(1), 63-83.